https://lampungpost.id/blog/category/kolom/opini/



Rubrik
Utama
Bandar Lampung
Ruwa Jurai
Bisnis
Pendidikan
Ekonomi
Nasional
Olahraga
Politika
Opini
Hiburan
Ragam
Agrobisnis
Seni Budaya
Fokus
Profil
Dunia Anak
Keluarga
Kesehatan
Apresiasi
Traveling
International
euro2008
Suplemen
Dunia Kampus
Bintang Pelajar
Teknologi
Properti
Otomotif
Xin Wen
Ponsel
Pesona Lampung
Sumpah Pemuda
KPK Versus Polri
Refleksi
Catatan 2009
Mengenang Gus Dur
Wedding
Kabinet Indonesia Bersatu II
Lampung Post
Terbit sejak 10 Agustus 1974
Info
Profil Perusahaan
Cari Berita

Senin, 25 Januari 2010

# OPINI

## Pilkada dan Autisme Politik

Hertanto
Pengajar FISIP Universitas Lampung

Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten dan kota di Lampung saat ini telah mulai memasuki proses seleksi calon di tingkat parpol dan verifikasi dukungan calon independen di tingkat penyelenggara (KPUD). Pilkada Lampung 2010 merupakan bagian integral dari proses demokrasi politik lokal yang kedua setelah pilkada pada tahun 2005.

Dibandingkan dengan yang pertama, pilkada 2010 ini akan lebih dinamis karena adanya calon independen/perorangan yang akan terlibat dalam kompetisi. Harapannya, pilkada 2010 ini akan lebih memberikan kontribusi terhadap proses pendalaman konsolidasi demokrasi lokal.

Namun dari sisi masyarakat, para pemilih pada pilkada 2010 tidak akan seantusias pada pilkada 2005, yang untuk pertama kalinya bisa secara langsung memilih kepala daerahnya tanpa mewakilkan kepada para anggota DPRD. Di sisi lain, pilkada 2005 waktu itu menjadi harapan atas perubahan yang mendasar bagi kesejahteraan dan keadilan. Kegairahan itu juga akan terganggu dengan munculnya gejala autisme politik, baik di kalangan parpol pengusung calon, para calon kepala/wakil kepala daerah; penyelenggara pilkada, dan pengawas. Autisme (Sugiarto, 2006) politik yaitu gejala yang menjangkiti lembaga politik dan elit politik yang sibuk dengan urusannya sendiri dan abai dengan dunia sekelingnya serta kepentingan masyarakatnya.

**Partai Politik**

Pragmatisme dan oligarkisme di lingkungan partai politik dituding para pengamat sebagai virus penyebab autisme politik parpol. Kekuasaan dalam mengambil keputusan di partai hanya ditentukan oleh segelintir elite saja. Fenomena penetapan para calon (kepala/wakil kepala daerah & caleg) yang hanya memprioritaskan anak, menantu, keponakan alias familiisme menunjukkan mental pragmatis masih mengemuka. Tentu tidak semua partai begitu, tetapi yang terkesan partai alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, hanya asyik dengan kepentingannya sendiri yang menjurus pada politik dinasti. Mekanisme penetapan calon lebih didasarkan atas kompromi-kompromi politik yang sangat oportunistik.

Secara umum, proses transisi politik dari otoritarian menuju demokratisasi yang salah satunya dicerminkan dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung telah terperangkap menjadi sistem yang oligarkis, baik di lingkungan partai politik maupun di lembaga-lembaga politik. Karena itu, perkembangan demokrasi kita belum mengarah pada penguatan kelembagaan partai-partai politik, yang terjadi justru deinstitusionalisasi partai politik. Partai politik tereduksi menjadi semata-mata hanya sebagai kendaraan politik (*political vehicle*) para elite politik. Kader partai begitu mudahnya pindah-pindah partai politik, tanpa harus merasa "malu". Padahal, demokrasi modern mestinya mengarah pada kehadiran partai-partai politik yang terlembagakan secara kuat dengan memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat untuk menghalau kemiskinan, ketidakadilan, kenaikan harga, konflik vertikal maupun horizontal, ketidakamanan dan rasa takut ancaman kejahatan. Sesuai janji-janji ketika mereka berkampanye.

Calon independen demo di Pesawaran (*Lampost*, [16-1-10]). Pasangan-pasangan calon perorangan di beberapa kabupaten kota telah menyerahkan syarat dukungan ke KPU di setiap daerahnya. Pada awalnya, calon perorangan ditetapkan MK untuk memulihkan hak politik personal warga negara yang

Berita Lainny
Ekonomi-Politi
Century
Membedah Per
Bogor
NUANSA: Par
'Gitu' Ya?
TAJUK: 'Cinca
Pemakzulan
POJOK
SMS INTERA
SURAT PEMB

pernah didominasi parpol. Calon perorangan juga diharapkan mampu mengurangi sifat oligarkis parpol dan meningkatkan kualitas kompetisi untuk mendapatkan kepemimpinan daerah yang visioner berintegritas.

Namun, gejala autisme politik pun berjangkit pada para calon perorangan ini karena mereka cenderung mencalonkan diri atas dasar keinginan semata. Mereka lebih asyik dengan angan-angan daripada melihat kenyataan yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Kenyataan politik Pilgub Lampung tahun 2008 lalu menunjukkan bahwa para calon perorangan tidak berjaya, semua mendapatkan suara pada peringkat bawah.

Mereka lebih percaya kepada bisikan para tim suksesnya daripada lembaga survei yang kredibel dan perancangan pemenangan yang sistematis dan bermartabat. Padahal tidak sedikit dana yang akan ditaburkan. Modal minimal para calon untuk merebut perhatian publik adalah stiker dan spanduk. Ekspresi ketatnya kompetisi terpancar dari ribuan wajah calon plus *vote getter* masing-masing (para ketua parpol di level daerah maupun pusat), terpampang di aneka stiker dan spanduk yang tersebar di mana-mana.

Asumsi yang muncul dari para calon perseorangan adalah "peluang tidak akan datang dua kali" sehingga semangatnya adalah *mak ganta kapan lagi* (kalau tidak sekarang, kapan lagi). Padahal kecenderungan di masyarakat pemilih, mereka enggan untuk memilih kedua kali kepada calon yang pernah kalah dalam pertandingan. Ini bisa dilihat pada kasus pilkada yang lalu di Lampung Barat dan di Tanggamus atau pada pilpres 2009 lalu. Artinya, setiap calon perseorangan mesti lebih bisa mengukur diri, membina dukungan secara rutin, dan menggalang peluang secara pasti.

**Penyelenggaraan dan Panwas**

Gejala autisme juga menjangkiti pelaksana (KPUD) dan pengawas pilkada (Panwas). Mereka asyik dengan egonya masing-masing berseteru atas dasar dalihnya sendiri. Sehingga pilkada Bandar Lampung dan Lampung Selatan dipastikan tanpa pengawasan dari panitia pengawas (panwas) pilkada (*Lampost*, [20-1]). Hal itu karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkeras tidak mengajukan nama-nama mantan panwas pemilu dan pilpres.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tidak akan melakukan *fit and proper test* sebelum KPU kabupaten/kota mengajukan nama-nama mantan panwas pemilu dan pilpres. Dengan begitu, mereka lebih mementingkan kepentingannya sendiri dan abai terhadap kepentingan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan sebuah *event* demokrasi lokal yang jujur dan adil.

**Kontrol Masyarakat Sipil**

Gejala autisme politik dalam pilkada akan menumbuhkan apatisme dan pesimisme dalam masyarakat pemilih. Karena masyarakat beranggapan pilkada tidak lebih dari ajang pertarungan kepentingan pribadi sehingga pilkada tidak akan terselenggara secara jurdil. Karena itu pula pilkada tidak akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan kontrol masyarakat yang sistematis di kalangan kelompok dan organisasi masyarakat sipil.

*Civil society* dan pers mempunyai peran dalam menanam kebiasaan-kebiasaan demokrasi pada masyarakat pemilih. Peran mereka akan memandu masyarakat untuk bisa memilih menurut hati nuraninya agar tidak kehilangan otonomi diri dalam menentukan pilihan politis. Kehilangan otonomi bisa terjadi karena hegemoni kekuasaan yang bermetamorfosis dalam bentuk persuasi materi, finansial, dan layanan iklan. Jika ambisi kekuasaan berubah rupa menjadi persuasi, yang ditonjolkan adalah penampilan/pencitraan (Lyotard, 2006).

Dengan demikian, keberhasilan Pilkada Lampung 2010 antara lain akan ditentukan oleh seberapa cekatan dan profesionalnya KPUD, serta efektivitas paswas dalam mengontrol tahapan pilkada, selain tentu saja kualitas partisipasi dan kedewasaan politik masyarakat dan para calon. n

Cetak Berita

Copyright © 2004 Lampung Post. All rights reserved.
In associated with Media Indonesia Online.
Comments and suggestions please email webmaster@metrotvnews.com

**URL: Repository Unila**

**Naskah Asli**

# PILKADA DAN AUTISME POLITIK

**HERTANTO**
**Pengajar FISIP Universitas Lampung**

Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten dan kota di Lampung saat ini telah mulai memasuki proses seleksi calon di tingkat parpol dan verifikasi dukungan calon independen di tingkat penyelenggara (KPUD). Pilkada Lampung 2010 merupakan bagian integral dari proses demokrasi politik lokal yang kedua setelah pilkada pada tahun 2005. Dibandingkan dengan yang pertama, pilkada 2010 ini akan lebih dinamis karena adanya calon independen/perorangan yang akan terlibat dalam kompetisi. Harapannya, pilkada 2010 ini akan lebih memberikan kontribusi terhadap proses pendalaman konsolidasi demokrasi lokal.

Namun dari sisi masyarakat, para pemilih pada pilkada 2010 tidak akan seantusias pada pilkada 2005, yang untuk pertama kalinya bisa secara langsung memilih kepala daerahnya tanpa mewakilkan kepada para anggota DPRD. Di sisi lain, pilkada 2005 waktu itu menjadi harapan atas perubahan yang mendasar bagi kesejahteraan dan keadilan. Kegairahan itu juga akan terganggu dengan munculnya gejala autisme politik, baik di kalangan parpol pengusung calon, para calon kepala/wakil kepala daerah; penyelenggara pilkada, dan pengawas. Autisme (Sugiarto, 2006) politik yaitu gejala yang menjangkiti lembaga politik dan elit politik yang sibuk dengan urusannya sendiri dan abai dengan dunia sekelingnya serta kepentingan masyarakatnya.

## Partai Politik

Pragmatisme dan oligarkisme di lingkungan partai politik dituding para pengamat sebagai virus penyebab autisme politik parpol. Kekuasaan dalam mengambil keputusan di partai hanya ditentukan oleh segelintir elite saja. Fenomena penetapan para calon (kepala/wakil kepala daerah & caleg) yang hanya memprioritaskan anak, menantu, keponakan alias familiisme menunjukkan mental pragmatis masih mengemuka. Tentu tidak semua partai begitu, tetapi yang terkesan partai alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, hanya asyik dengan kepentingannya sendiri yang menjurus pada politik dinasti. Mekanisme penetapan calon lebih didasarkan atas kompromi-kompromi politik yang sangat oportunistik.

Secara umum, proses transisi politik dari otoritarian menuju demokratisasi yang salah satunya dicerminkan dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung telah terperangkap menjadi sistem yang oligarkis, baik di lingkungan partai politik maupun di lembaga-lembaga politik. Karena itu, perkembangan demokrasi kita belum mengarah pada penguatan kelembagaan partai-partai politik, yang terjadi justru deinstitusionalisasi partai politik. Partai politik tereduksi menjadi semata-mata hanya sebagai kendaraan politik (*political vehicle*) para elite politik. Kader partai begitu mudahnya pindah-pindah partai politik, tanpa harus merasa “malu”. Padahal, demokrasi modern mestinya mengarah pada kehadiran partai-partai politik yang terlembagakan secara kuat dengan memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat untuk menghalau kemiskinan, ketidakadilan, kenaikan harga, konflik vertikal maupun horizontal, ketidakamanan dan rasa takut ancaman kejahatan. Sesuai janji-janji ketika mereka berkampanye.

## Calon Indpendepen

Pasangan-pasangan calon perorangan (caper) di beberapa kabupaten kota telah menyerahkan syarat dukungan ke KPU di setiap daerahnya. Pada awalnya, calon perorangan ditetapkan MK untuk memulihkan hak politik personal warga negara yang pernah didominasi parpol. Calon perorangan (caper) juga diharapkan mampu mengurangi sifat oligarkis parpol dan meningkatkan kualitas kompetisi untuk mendapatkan kepemimpinan daerah yang visioner berintegritas.
Namun, gejala aurtisme politik pun berjangkit pada para calon perorangan ini, karena mereka cenderung mencalonkan diri atas dasar keinginan semata. Mereka lebih asyik dengan angan-angan daripada melihat kenyataan yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Kenyataan politik pilcagub Lampung tahun 2008 lalu menunjukkan bahwa para caper tidak berjaya, semua mendapatkan suara pada peringkat bawah. Mereka lebih percaya kepada bisikan para tim suksesnya daripada lembaga survey yang kredibel dan perancangan pemenangan yang sistematis dan bermartabat. Padahal tidak sedikit dana yang akan ditaburkan. Modal minimal para calon untuk merebut perhatian publik adalah stiker dan spanduk. Ekspresi ketatnya kompetisi terpancar dari ribuan wajah calon plus *vote getter* masing-masing (para ketua parpol di level daerah maupun pusat), terpampang di aneka stiker dan spanduk yang tersebar di mana-mana.
Asumsi yang muncul dari para caper adalah ”peluang tidak akan datang dua kali” sehingga semangatnya adalah ”kalo tidak sekarang kapan lagi”. Padahal kecenderungan di masyarakat pemilih, mereka enggan untuk memilih kedua kali kepada calon yang pernah kalah dalam pertandingan. Ini bisa dilihat pada kasus pilkada yang lalu di Lampung Barat dan di Tanggamus atau pada pilpres 2009 lalu. Artinya, setiap caper mesti lebih bisa mengukur diri, membina dukungan secara rutin, dan menggalang peluang secara pasti.

## Penyelenggaraan dan Panwas

Gejala autisme juga menjangkiti pelaksana (KPUD) dan pengawas pilkada (Panwas). Mereka asyik dengan egonya masing-masing berseteru atas dasar dalihnya sendiri. Sehingga pilkada Bandar Lampung dan Lampung Selatan dipastikan tanpa pengawasan dari panitia pengawas (panwas) pilkada (Lampost, 20/1). Hal itu karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkeras tidak mengajukan nama-nama mantan panwas pemilu dan pilpres. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tidak akan melakukan *fit and proper test* sebelum KPU kabupaten/kota mengajukan nama-nama mantan panwas pemilu dan pilpres. Dengan begitu, mereka lebih mementingkan kepentingannya sendiri dan abai terhadap kepentingan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan sebuah even demokrasi local yang jujur dan adil.

## Kontrol Masyarakat Sipil

Gejala autisme politik dalam pilkada akan menumbuhkan apatisme dan pesimisme dalam masyarakat pemilih. Karena masyarakat beranggapan pilkada tidak lebih dari ajang pertarungan kepentingan pribadi, sehingga pilkada tidak akan terselenggara secara jurdil. Karena itu pula pilkada tidak akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan kontrol masyarakat yang sistematis di kalangan kelompok dan organisasi masyarakat sipil. Civil Society dan pers mempunyai peran dalam menanam kebiasaan-kebiasaan demokrasi pada masyarakat pemilih. Peran mereka akan memandu masyarakat untuk bisa memilih menurut hati

nuraninya agar tidak kehilangan otonomi diri dalam menentukan pilihan politis. Kehilangan otonomi bisa terjadi karena hegemoni kekuasaan yang bermetamorfosis dalam bentuk persuasi materi, finansial, dan layanan iklan. Jika ambisi kekuasaan berubah rupa menjadi persuasi, maka yang ditonjolkan adalah penampilan/pencitraan (Lyotard, 2006).

Dengan demikian, keberhasilan pilkada Lampung 2010 antara lain akan ditentukan oleh seberapa cekatan dan profesionalnya KPUD, serta efektivitas paswas dalam mengontrol tahapan pilkada, selain tentu saja kualitas partisipasi dan kedewasaan politik masyarakat dan para calon.

hertanto.1960@fisip.unila.ac.id